

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995

Oleh

Yeni Wijayanti

Dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Galuh Ciamis

E-mail: yeniunigal@gmail.com

ABSTRAK

Sepanjang sejarah, perjalanan hubungan antara Indonesia-Australia mengalami fluktuasi. Hubungan dimulai dengan keharmonisan pada saat Indonesia merdeka. Australia berperan dalam membantu baik secara moril maupun materil terhadap perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Namun selanjutnya hubungan antara Indonesia dan Australia hampir selalu bergejolak. Faktor penyebab pasang naik dan surutnya hubungan Indonesia-Australia adalah perbedaan dalam hal pelaksanaan demokrasi dan budaya politik, kebijakan politik luar negeri, adanya kekhawatiran dan persepsi ancaman keamanan, dan kurang kokohnya hubungan ekonomi kedua negara.

Kata Kunci: *Dinamika, Hubungan Bilateral*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dan Australia sejak tahun 1945 hingga 1995 selalu menunjukkan gambaran yang menarik. Ini tidak lain karena hubungan antara Indonesia dan Australia selalu diwarnai pasang naik dan surut. Pada awalnya, hubungan kedua negara terjalin amat baik, terutama ketika Indonesia baru saja merdeka tahun 1945. Akan tetapi, setelah itu hubungan antara Indonesia dan Australia hampir selalu bergejolak. Walaupun kedua negara mempunyai kepentingan yang sama, namun perbedaan yang besar antara keduanya menjadi salah satu faktor penyebab rapuhnya hubungan Indonesia dan Australia.

Tulisan ini mengkaji dinamika hubungan antara Indonesia dengan Australia. Pada bagian awal akan diuraikan mengenai pasang surut hubungan kedua negara dan selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab pasang surutnya hubungan bilateral tersebut. Dan pada akhirnya, dengan mengetahui

penyebabnya diharapkan kita dapat mencari solusi agar hubungan kedua negara semakin baik dan kukuh.

PEMBAHASAN

Pasang Surut Hubungan Indonesia dan Australia

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia berjalan dengan awal yang baik. Kehangatan hubungan keduanya ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa Australia mendukung dan membantu perjuangan rakyat Indonesia yang sedang berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan pada periode 1945-1949. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah Australia tetapi juga dari masyarakatnya, terutama dari perserikatan buruh. Disamping menggalang dana untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, para buruh juga melakukan aksi boikot terhadap 559 kapal-kapal dagang dan perang Belanda yang sedang bersiap membawa kembali pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Bagi Indonesia,

sikap Australia tersebut dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti. Pihak Indonesia pun mengetahui bahwa dalam dua kali agresi militer Belanda terhadap Indonesia, Australia secara konsisten mencela tindakan Belanda tersebut.

Pihak pemerintah Australia sejak semula mengambil prakarsa membawa masalah Indonesia ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Selain itu, pemerintah Australia juga berupaya menciptakan internasionalisasi masalah Indonesia. Sikap Australia seperti yang dikemukakan di atas itulah yang mendorong pemimpin kita memilih Australia sebagai salah satu anggota ketika PBB membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik yang lebih terkenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Australia mewakili kepentingan Indonesia dalam komisi jasa-jasa baik PBB, yang kemudian menjadi komisi PBB untuk Indonesia (*United Nations Commission on Indonesia-UNCI*) bersama Amerika dan Belgia berusaha menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. UNCI secara aktif mengawasi perundingan antara Indonesia dengan Belanda, mulai dari perundingan di atas kapal milik Renville sampai dengan Konferensi Meja Bundar. Misi mereka akhirnya berhasil terlaksana, yaitu ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, pada saat pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Australia juga salah satu dari sedikit negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Secara *de facto*, Australia mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Juli 1947, sedangkan secara *de Jure* pada bulan Desember 1949. Negara ini juga menjadi *co-sponsor* Indonesia ketika akan masuk menjadi anggota PBB tahun 1950.

Hubungan yang pada awalnya baik, ironisnya tidak berlangsung lama. Pada periode tahun 1950-an hingga tahun 1960-

an, jalinan hubungan kedua negara memburuk. Pada awal tahun 1950-an, Australia mulai menampakkan diri sebagai negara yang 'menentang' Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno yang berusaha merebut kembali Irian Barat (1957-1963) dan konfrontasi dengan Malaysia (1963-1966). Selain itu, pergantian pemerintahan di Australia, dari Partai Buruh dengan Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley kepada Partai Koalisi Liberal-Country di bawah pimpinan Robert Menzies pada 10 Desember 1949, juga mempengaruhi cukup signifikan terhadap hubungan Australia-Indonesia pada periode 1950 sampai dengan pertengahan tahun 1960-an. Hal ini disebabkan karena perbedaan ideologi antara Partai Buruh dan Koalisi Liberal-Country, yang pada gilirannya mengubah pandangan Australia terhadap Indonesia. Pemerintah baru tersebut menentang kedaulatan Indonesia atas Irian Barat dan lebih senang dengan keberadaan Belanda di Irian Barat.

Dalam kaitan ini, ada beberapa alasan yang dikemukakan Australia. Pertama, Australia khawatir akan kemampuan Indonesia sebagai negara baru merdeka menanggung beban tambahan membangun sebuah wilayah yang seprimitif Irian Barat. Kedua, Australia khawatir dengan adanya bibit-bibit Komunisme di Indonesia. Namun, hubungan antara Australia-Indonesia kembali menghangat dengan kejatuhan Sukarno dan dimulai era kepemimpinan baru Indonesia di bawah Suharto tahun 1967. Pemerintah baru Indonesia yang anti Komunis dan lebih mengutamakan kebijakan Luar Negeri yang bebas aktif, ternyata menjadi salah satu faktor yang kondusif bagi pesatnya hubungan antara Australia dengan Indonesia.

Bukti bahwa hubungan Australia-Indonesia kondusif adalah, dibentuknya suatu konsorsium lembaga keuangan internasional yaitu *Intern Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1967 untuk membantu pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1968, dibentuk *Cultural Agreement* yang membantu program pertukaran bersama di bidang budaya dan pendidikan. Selain itu, namapak kedua pemimpin negara saling mengadakan kunjungan balasan pada tahun 1970-an.

Hubungan kedua negara kembali retak ketika Indonesia melakukan intervensi militer ke Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975. Tewasnya lima wartawan Australia di medan pertempuran Balibo, Timor Timur, menambah keruhnya hubungan Australia dan Indonesia. Situasi ini memaksa Indonesia untuk tidak memperpanjang ijin tinggal dua koresponden *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) yaitu Warwick Butler dan Joe Comman yang berakhir tanggal 15 Juli 1980. Ini berarti berakhir sudah peliputan ABC di Indonesia yang sudah berlangsung selama 20 tahun.

Kebekuan hubungan kedua negara cair kembali setelah Partai Buruh berkuasa lagi pada tahun 1983. Kemenangan Bob Hawke atas Malcolm Fraser dari Partai Koalisi Liberal-Nasional membawa angin segar bagi dikukuhkannya kembali hubungan Jakarta-Canberra. Dari tahun ke tahun hubungan ini meningkat secara perlahan. Ini terlihat, misalnya dari kunjungan sepuluh menteri Australia dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986. Puncak dari kehangatan hubungan kedua negara terjadi pada 22 Agustus 1985, yaitu ketika PM Bob Hawke menyatakan mengakui secara *de jure* integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Hanya saja, ketika David Jenkins menulis artikel yang menyoroti tentang bisnis keluarga Suharto, hubungan antara Australia-Indonesia retak

kembali. Sebagai reaksi terhadap tulisan itu, pemerintah Indonesia membatalkan kunjungan menteri Ristek, B.J. Habibie. Selain itu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, visa kunjungan ke Bali, turis Australia satu pesawat penuh ditolak. Pemerintah Indonesia juga memperpanjang larangan bagi wartawan Australia untuk meliput di Indonesia. Kerjasama militer yang telah berlangsung juga dibatalkan. Bahkan, wartawan Australia yang mendampingi Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dalam kunjungannya ke Bali juga tidak diijinkan.

Krisis yang ditimbulkan oleh tulisan Jenkins menyebabkan surutnya hubungan Jakarta-Canberra berada pada titik nadir hampir selama dua tahun. Ketegangan ini mulai mencair pada tahun 1988. Ini terlihat antara lain dari pernyataan Menteri Pertahanan Australia, Kim Beazly pada tanggal 23 Pebruari 1988, yang mendesak pemerintah agar kembali memperbaiki hubungan kerja sama pertahanan keamanan dengan Indonesia. Pernyataan ini dapat dianggap sebagai salah satu proses dibukanya kembali hubungan setelah kasus Jenkins.

Sejak saat itu hingga Juni 1995, hubungan kedua negara membaik. Meskipun diantara periode tersebut terjadi peristiwa Santa Cruz di Dili pada tanggal 11 November 1991, yang menuai protes keras dari pemerintah dan sebagian besar masyarakat Australia, tetapi hubungan kedua negara relatif lancar. Ini antara lain karena kedua negara mampu memperkokoh landasan hubungan bilateral mereka melalui hubungan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas, dan Gareth Evans serta antara Presiden Suharto dan Perdana Menteri Keating yang membuka jalur komunikasi *hotline* sejak tahun 1992, dan peningkatan kerja sama diberbagai bidang (ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan budaya).

Dalam bidang ekonomi, misalnya, kedua negara berhasil menandatangani Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989, yang mengatur kerjasama eksplorasi minyak di Laut Timor, wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Pada tahun 1992, kedua negara juga berhasil membuat Forum Menteri Indonesia-Australia. Melalui forum ini diharapkan kedua negara dapat meningkatkan kerjasama dibidang pangan dan pertanian, perdagangan, industri dan investasi. Selain itu, dari kunjungan PM Paul Keating ke Indonesia, RI- Australia menandatangani kesepakatan dibidang ekonomi yaitu perjanjian pajak berganda yang membagi hak pajak kedua negara dalam kegiatan ekspor dan impor. Perjanjian tersebut mengenai pembebasan suatu barang yang diberikan satu negara untuk barangnya dan jangan sampai satu komponen barang dikenakan pajak ganda. Selain itu, Australia juga rutin memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 100 juta dollar Australia untuk pembangunan Kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, dibidang pertahanan keamanan, kedua negara menunjukkan peningkatan hubungan yang semakin substansial. Selain berhasil menandatangani perjanjian akstradisi dan pengaturan nelayan, hubungan baik dalam aspek pertahanan dan keamanan juga terlihat dari berbagai bentuk kerjasama, seperti: kunjungan pejabat militer, transparansi dalam hal kekuatan pertahanan keamanan, program pendidikan dan latihan militer gabungan kedua negara. Sejak tahun 1990, Indonesia dan Australia telah mengadakan latihan militer gabungan seperti: *Knight Komodo* dan *Kookaburra* (Angkatan Darat), *Ausina Passes* dan *Ausina Patrolexs* (AL), serta Rajawali Ausindo dan Elang Ausindo (AU). Indonesia juga beberapa kali menjadi pengamat latihan militer gabungan angkatan bersenjata Australia dengan sandi Kangaroo, sejak

tahun 1989. Status Indonesia berubah menjadi partisipan aktif dalam Kangaroo 95 pada tahun 1995.

Usaha memperkokoh kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang budaya ditunjukkan dengan dijalinnya kerjasama bidang pendidikan, sosial budaya dan turisme. Pada tahun 1989, mereka berhasil membentuk *Australia-Indonesia Institute*, yang menunjang kontak rakyat antara kedua negara, yang berfungsi mengimbangi hubungan lebih resmi di tingkat pemerintahan. Selain itu, Australia juga memberi beasiswa guna melanjutkan pendidikan di negeri Kanguru melalui *Australian International Development Assistance Bureau* (AIDAB) yang kemudian berganti nama AUSAID.

Di tengah eratnya hubungan Australia-Indonesia, gelombang pasang sekali lagi menghantam pada tahun 1995-an. Ada tiga peristiwa penting yang mengganggu hubungan kedua negara tersebut saat itu. Pertama, penolakan Australia terhadap Letjen (purn) H.B.L. Mantiri sebagai calon dubes yang diajukan oleh Indonesia untuk Australia pada tanggal 6 Juli 1995. Penolakannya ini dikaitkan dengan ucapannya kepada Majalah Editor ketika menjabat sebagai Panglima Udayana dengan yurisdiksi atas daerah Timor Timur. Masyarakat Australia menuntut Mantiri untuk minta maaf atas ucapannya tersebut, yang ternyata tuntutan ini kemudian diabaikan oleh Indonesia. Kedua, pemberian visa oleh Australia kepada 18 imigran asal Timor Timur yang melarikan diri pada tanggal 24 Mei 1995. Ketiga, insiden pembakaran bendera merah putih oleh demonstran TimTim anti-integrasi di beberapa kota Australia, seperti Sydney, Brisbane, Melbourne, dan Adelaide.

Reaksi yang muncul atas peristiwa tersebut kemudian menimbulkan tanggapan timbal balik yang bereskalasi. Demonstrasi, nota protes serta ancaman boikot yang

dilancarkan oleh Gabungan Pengusaha Eksportir Nasional Seluruh Indonesia (GAPENSI) merupakan salah satu contoh yang dapat disebutkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengosongkan pos dubes RI di Australia yang sebelumnya dijabat oleh Sabam Siagian selama hampir delapan bulan, sebelum pada akhirnya tanggal 6 Desember 1995, menetapkan penggantinya Wirjono Sastrohandoyo.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia selalu mengalami pasang surut. Pada suatu ketika, hubungan keduanya sangat baik, tetapi lain ketika terjadi perubahan pada pendapat publik dan iklim politik di masing-masing negara, dapat membuat hubungan keduanya terhempas ke titik nadir.

Faktor Penyebab Pasang Surutnya Hubungan Australia-Indonesia

Kedekatan geografis kedua negara yang berbatasan langsung tidak menjamin hubungan keduanya berjalan harmonis terus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bermuara pada empat hal pokok yaitu perbedaan dalam hal pelaksanaan demokrasi dan budaya politik, kebijakan politik luar negeri, adanya persepsi ancaman, dan kurang kokohnya hubungan ekonomi kedua negara.

1. Praktek Demokrasi dan Budaya Politik

Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam melaksanakan demokrasi. Sebagai suatu negara yang menganut sistem presidensial, kekuasaan politik lebih terpusat pada presiden. Tatanan politik dan sistem sosial negara ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. sebagai satu-satunya ideologi negara, Pancasila mengikat seluruh aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, politik Australia dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip

demokrasi liberal yang mengacu pada sistem parlementer. Nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma liberal seperti hak individu, dan kebebasan berpendapat telah menjadi ciri utama dalam kehidupan masyarakat dan penguasa Australia dalam menjalankan pemerintahannya.

Perbedaan politik antara Indonesia dan Australia memunculkan perbedaan dalam sistem nilai budaya masing-masing negara. Pertama, Indonesia menekankan pada prinsip sosial atau gotong royong, berbeda dengan Australia yang lebih menekankan pada privat. Kedua, Indonesia lebih menekankan pada hak kolektif, sedangkan Australia pada hak individu. Ketiga, Indonesia sangat sensitif terhadap kritik apabila terpaksa maka melakukannya secara halus, sedangkan Australia mengungkapkan kritik secara terbuka. Di Indonesia, sebisa mungkin menghindari konflik agar tidak menimbulkan rasa sakit hati dan malu.

Perbedaan nilai di atas sering menimbulkan friksi di antara kedua negara tersebut. Ini terjadi karena masing-masing pihak sering memunculkan stereotip negatif terhadap negara lain. Banyak kalangan di Australia menilai Indonesia sebagai negara yang otoriter dan diktator, sedangkan Indonesia menilai bahwa Australia kurang bertanggungjawab dalam menjalankan demokrasinya, seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah dilontarkan secara umum. Bagi Indonesia, kebebasan pers bukan hal pokok dibanding dengan stabilitas politik negara. Dapat dipahami bahwa kesalahpahaman sering terjadi akibat perbedaan di atas.

2. Kebijakan Politik Luar Negeri

Hubungan Australia-Indonesia pada permulaan sangat baik, namun pada periode selanjutnya banyak mengalami pasang surut. Indonesia cenderung lebih banyak memberikan fokus kebijakan luar negerinya

terhadap negara lain dibanding sahabat lamanya, Australia. Di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia menjadi penggagas Gerakan non-Blok. Kebijakan luar negeri Indonesia sampai pertengahan tahun 1960-an lebih banyak menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan Inggris dengan menarik perhatian Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia.

Ketika Suharto menggantikan Sukarno, kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Arab. Indonesia memandang hubungannya dengan Australia tidak terlalu penting. Pada sisi lain, Australia lebih memilih memfokuskan hubungan luar negerinya yang lebih substansial dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Amerika, meskipun ia menilai Indonesia mempunyai arti penting. Perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara yang terkandung dalam arah dan kebijakan luar negerinya menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi diantara kedua negara yang menimbulkan ketegangan dan konflik antara Indonesia-Australia.

3. Kekhawatiran dan Ancaman

Keamanan

Posisi Indonesia yang berada di persimpangan jalur internasional dan dua benua, dua samudra serta jumlah penduduknya yang masuk dalam lima besar, menjadi sebuah hal yang penting bagi Australia untuk merancang kebijakan pertahanan keamanannya. Ketidakstabilan politik dalam negeri Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam Australia, yaitu melalui imigrasi orang-orang Indonesia ke wilayah Australia.

Persepsi ancaman yang datang dari Utara berawal dari kesadaran posisi

demografis Australia yang terpencil di ujung belahan Selatan dunia. Ini memberikan konsekuensi bagi perancang keamanan untuk memberi prioritas yang lebih pada wilayah Utara, tidak ada ancaman lain yang datang kecuali dari arah Utara. Oleh karena itu, Australia memberikan perhatian terhadap Indonesia. Mereka memberi perhatian khusus terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Australia memandang negara di sebelah Utara-nya sebagai *buffer* atau pelindungnya apabila ada serangan musuh dari Utara. Namun pada saat yang sama Australia juga memandang Indonesia sebagai ancaman.

Sikap saling curiga antara kedua negara mempengaruhi kadar hubungan mereka. Hal ini dikarenakan kebijakan pertahanan masing-masing untuk mempertahankan wilayahnya dianggap sebagai persiapan melancarkan serangan atau agresi ke pihak lain. Kepercayaan satu sama yang lain berkurang. Kurangnya kepercayaan menjadikan pondasi hubungan kedua negara rapuh.

4. Hubungan Kerjasama Ekonomi Yang Lemah

Secara teoritis, kedekatan geografis suatu negara akan memberikan motivasi untuk mengadakan kerjasama ekonomi yang erat. Hal ini dipengaruhi oleh biaya transportasi yang rendah. Ironisnya, ini tidak terjadi pada hubungan Australia-Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara dalam bidang ekonomi sangat terbatas. Dilihat dari segi perdagangan, hubungan kedua negara sangat lambat. Faktor penyebabnya adalah rendahnya intensitas barang komplementer kedua negara. Australia dan Indonesia merupakan negara yang ekspor utamanya didominasi oleh barang-barang pertanian dan pertambangan.

Selain itu, rendahnya perdagangan kedua negara juga disebabkan oleh proteksi dan strategi perdagangan. Keadaan politik

juga menyebabkan pengusaha enggan untuk berbisnis satu dengan yang lainnya. Faktor lain adalah ketidakacuhan terhadap kondisi-kondisi dan kesempatan berusaha di antara kedua negara. Perusahaan-perusahaan Australia dan Indonesia sangat lambat mengambil kesempatan bisnis satu sama lainnya. Mereka lebih memilih mitra dagang dari negara lain. Misalnya, Indonesia lebih memilih Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, sedangkan Australia memilih Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Asia Timur.

Dilihat dari aspek investasi, Australia tidak termasuk dalam kelompok investor terbesar di Indonesia. Australia hanya menempati 2,1% dari keseluruhan investasi asing yang disetujui masuk ke Indonesia, negara-negara investor terbesar masih didominasi dari negara-negara Asia Timur (seperti, Jepang, Korea, Hongkong, dan Taiwan) dan Singapura. Dilihat dari perspektif Australia, Indonesia hanya menempati 0,2% dari keseluruhan investasi asing. Investasi Australia banyak tertuju pada Inggris dan Amerika Serikat. Investasi terhadap negara-negara berkembang menempati proporsi sangat kecil dan hanya tiga negara yang memperoleh hampir separuh dari investasi, yaitu Singapura, Hong Kong, dan Papua New Guinea. Alasannya, mereka lebih nyaman menanamkan modalnya di negara yang dikenalnya.

PENUTUP

Simpulan

Pasang naik dan surut hubungan Australia-Indonesia yang terjadi secara periodik selama beberapa dekade dipengaruhi oleh beberapa perbedaan yang substansial dalam aspek politik, kebijakan luar negeri, keamanan dan ekonomi. Berdasarkan perspektif politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dan Australia masih kurang memperhatikan satu sama

lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar yang kokoh bagi hubungan yang stabil.

Kekhawatiran keamanan telah menyebabkan ketidakpercayaan yang dapat mengarah pada hubungan kedua negara yang kurang baik. Perbedaan filosofis politik, sejarah, sistem nilai budaya dan etnisitas, terkadang menjadi penyebab memburuknya hubungan kedua negara. Contohnya, satu komentar mengenai isu domestik yang dilontarkan oleh satu pihak secara potensial ditanggapi sikap yang berbeda oleh pihak lain. Bahkan mereka beranggapan bahwa pihak lain telah mencampuri urusan internal negaranya.

Meskipun demikian, usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral yang kokoh selalu dijalankan. Mereka juga menyetujui untuk menyampingkan masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik. Indonesia maupun Australia memandang bahwa kedua negara bisa menjadi mitra untuk bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka merasa perlu adanya eksistensi rasa percaya pada masing-masing pihak bahwa mereka adalah mitra satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Chauvel, Richard H. 1992. *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardjono, Ratih. 1992. *Suku Putihnya Australia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. Jakarta: Gramedia
- Nusa Bhakti, Ikrar. Dkk. 1997. *Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia-Australia, Kaitannya dengan Stabilitas Keamanan Regional Asia Tenggara: Suatu Tinjauan Starategis Politis*. Jakarta: Puslitbangpolwil LIPI dan Balitang Deplu.

Siboro, Julius. 2012. *Sejarah Australia: Dari Terbentuknya Commonwealth of Australia sampai dengan Terbentuknya Kerja Sama Regional dengan Negara-Negara Asia dan Pasifik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.